

Struktur dan Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2025 Dalam Konteks Pembangunan Nasional

**Akhmad Ilham Kamalik¹, Driyan Andika², Ibnu Maulana³,
Nurul Anwar Firdaus⁴, Restu⁵, Gama Pratama⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : akhmadilhamk@gmail.com¹, drianandika95@gmail.com², iibmaulana2@gmail.com³,
nurulanwarfagaruda25@gmail.com⁴, vivorestu@gmail.com⁵, gamapratama@gmail.com⁶

Received: 2025-10-23; Accepted: 2025-11-17; Published: 2025-12-30

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis struktur dan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2025 dalam konteks pembangunan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan untuk menelaah kebijakan ekonomi makro, peran sektor industri dan jasa, serta relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam fase transisi menuju struktur yang lebih modern, dengan pergeseran dominasi dari sektor primer ke industri pengolahan dan jasa berbasis digital. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 5,2–5,4% didukung oleh konsumsi domestik, investasi produktif, dan ekspor bernilai tambah. Meskipun demikian, ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta ketergantungan pada komoditas primer masih menjadi tantangan utama. Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 menekankan strategi pembangunan inklusif, penguatan ekonomi hijau, dan hilirisasi industri sebagai arah kebijakan utama. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi struktural dan kebijakan ekonomi yang adaptif merupakan kunci dalam mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” yang makmur, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Keyword: *Struktur Ekonomi; Pembangunan Nasional; Transformasi Struktural, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

This study analyzes the structure and performance of Indonesia's economy in 2025 within the context of national development focusing on economic transformation, equity, and sustainability. A qualitative approach using literature review methods is employed to examine macroeconomic policies, the role of the industrial and service sectors, as well as the relevance of Islamic economic values in supporting equitable development. The study results indicate that the Indonesian economy is in a transitional phase toward a more modern structure, with a shift in dominance from the primary sector to manufacturing and digitally-based services. Economic growth is estimated to reach around 5.2-5.4%, supported by domestic consumption, productive investment, and value-added exports. Nevertheless, interregional disparities, low labor productivity, and dependence on primary commodities remain major challenges. Through the RPJMN 2025-2029, the government emphasizes an inclusive development strategy, Strengthening the green economy and downstreaming industries as the main policy directions. Overall, this study emphasizes that structural transformation and adaptive economic policies are key to realizing the vision of a prosperous, independent, and socially just "Golden Indonesia 2045".

Keywords: *economic structure; national development; structural transformation; Islamic economy.*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menempati posisi strategis dalam dinamika global yang semakin kompleks dan kompetitif. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh disrupsi geopolitik, perlambatan ekonomi di negara-negara maju, perubahan iklim global, serta transformasi teknologi yang masif, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif kuat. Fondasi makroekonomi yang stabil, kinerja fiskal yang hati-hati, serta kebijakan moneter yang responsif menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional. Namun demikian, stabilitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi yang kokoh dan inklusif, karena masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif struktural, ekonomi Indonesia sedang berada pada fase transisi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi bernilai tambah dan berorientasi industri. Sektor industri pengolahan, jasa keuangan, perdagangan, serta teknologi informasi menjadi motor utama perekonomian nasional. Program hilirisasi sumber daya alam yang dijalankan pemerintah berhasil meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat daya tahan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global. Namun, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berfluktuasi, dan sebagian besar kegiatan ekonomi masih bergantung pada konsumsi domestik. Hal ini menandakan bahwa transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih

produktif dan berorientasi ekspor masih membutuhkan percepatan dan konsistensi kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 5,1% hingga 5,3%, menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi sektor riil, serta ekspansi industri manufaktur dan digital. Namun demikian, ketimpangan produktivitas antarwilayah, keterbatasan inovasi teknologi, dan masih tingginya ketergantungan pada impor bahan baku menjadi kendala yang menghambat optimalisasi pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Kestabilan makroekonomi yang tercermin dari inflasi terkendali menjadi pilar penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan pasar. Pada tahun 2025, inflasi nasional relatif stabil di kisaran $3 \pm 1\%$, menunjukkan efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Namun, tekanan inflasi dari sisi suplai akibat gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi global, serta ketergantungan terhadap impor pangan strategis masih menjadi potensi ancaman terhadap stabilitas harga jangka menengah. Oleh karena itu, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan efisiensi logistik menjadi isu sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam konteks eksternal, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan fluktuasi moderat sepanjang tahun 2025. Pergeseran kebijakan suku bunga global dan ketidakpastian aliran modal internasional menimbulkan tekanan tersendiri terhadap stabilitas kurs. Sektor ekspor-impor Indonesia juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Meskipun kinerja ekspor meningkat berkat kebijakan hilirisasi mineral dan diversifikasi produk manufaktur, impor barang modal dan bahan baku masih cukup tinggi karena keterbatasan industri pendukung domestik. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya strategi industrialisasi yang lebih dalam, termasuk pengembangan industri intermediate, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, serta penguatan konektivitas logistik nasional agar daya saing ekspor dapat meningkat secara berkelanjutan.

Di sisi ketenagakerjaan, perbaikan indikator makro belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang menurun hingga sekitar 4,5% tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi pasar

tenaga kerja yang ideal. Proporsi pekerja informal masih tinggi, sementara kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja (skills mismatch) tetap menjadi persoalan mendasar. Selain itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia, menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata. Fenomena ini menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif, berbasis wilayah, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional dan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada transformasi struktural, industrialisasi berkelanjutan, dan penguatan ekonomi hijau. Program hilirisasi, digitalisasi UMKM, percepatan infrastruktur konektivitas, serta transisi energi terbarukan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di sisi fiskal, kebijakan diarahkan pada efisiensi belanja negara, penguatan penerimaan melalui reformasi perpajakan, serta peningkatan efektivitas transfer ke daerah. Sementara itu, di bidang moneter dan sektor keuangan, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memperkuat inklusi keuangan melalui inovasi sistem pembayaran digital nasional.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan implementatif. Fragmentasi kebijakan antarinstansi, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, serta disparitas kapasitas fiskal daerah sering kali menjadi penghambat optimalisasi kebijakan ekonomi. Selain itu, tekanan eksternal seperti peningkatan proteksionisme global, perubahan iklim ekstrem, serta disrupsi teknologi menuntut Indonesia untuk lebih adaptif dalam menata strategi pembangunan yang tangguh dan berorientasi jangka panjang.

Meski demikian, prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap menunjukkan arah yang optimistis. Dengan potensi pasar domestik yang besar, bonus demografi yang produktif, serta semakin kuatnya basis ekonomi digital, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai hal tersebut, transformasi ekonomi harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan output, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi nasional yang berlandaskan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka kajian mengenai struktur dan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2025 dalam konteks pembangunan nasional menjadi sangat relevan. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana arah pembangunan nasional memengaruhi struktur

ekonomi, sejauh mana kebijakan fiskal dan moneter berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi, serta bagaimana kinerja sektor-sektor strategis mampu mendukung pertumbuhan inklusif. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan empiris dan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga sebagai proses intelektual untuk membangun kembali pemahaman ilmiah tentang peran ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi Indonesia di era globalisasi digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara lebih mendalam sisi konseptual, teoretis, dan nilai-nilai normatif yang menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam modern. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas sosial dan ekonomi tidak hanya dari sudut pandang empiris, tetapi juga dari perspektif nilai serta prinsip moral yang melandasinya. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara proses digitalisasi, transformasi ekonomi nasional, dan relevansi nilai-nilai Islam sebagai pedoman etika serta arah kebijakan dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi global.

Proses penelitian dilakukan dengan menelusuri secara sistematis berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan mutakhir, seperti artikel akademik, laporan kebijakan, regulasi pemerintah, serta publikasi jurnal bereputasi nasional dan internasional. Literatur yang ditelaah mencakup bidang-bidang seperti ekonomi makro, ekonomi digital, kebijakan publik, serta ekonomi Islam. Pada tahap awal, peneliti melakukan seleksi ketat terhadap referensi yang relevan dengan fokus kajian, dengan mempertimbangkan keabsahan data, kredibilitas sumber, dan kesesuaian konteks. Setelah itu, dilakukan pemetaan isu-isu utama dan pengelompokan konsep guna menemukan pola hubungan antara variabel ekonomi, peran kebijakan, dan nilai-nilai Islam dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini membantu proses analisis agar tersusun secara sistematis dan logis.

Metode studi literatur menekankan pada analisis kritis dan integratif terhadap teori, konsep, serta temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi: 1. Identifikasi dan Seleksi Literatur, 2. Klasifikasi dan Pemetaan Isu Utama, 3. Analisis dan Sintesis Data, 4. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial-ekonomi secara lebih mendalam dan holistik.

Dengan metode studi literatur, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga membangun kerangka konseptual yang kritis dan transformatif, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi Islam di masa depan.

Tahap akhir penelitian melibatkan analisis dan sintesis reflektif terhadap seluruh literatur yang telah dikaji. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan data sekunder secara mendalam untuk menemukan hubungan antara teori, fakta lapangan, dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Selanjutnya, sintesis dilakukan dengan menggabungkan berbagai temuan dan pandangan ilmiah guna menghasilkan pemahaman baru yang bersifat kritis dan menyeluruh. Hasil sintesis ini menjadi dasar dalam membangun argumentasi ilmiah yang solutif dan transformatif, yang tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara deskriptif, tetapi juga menawarkan pandangan normatif berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan ekonomi Islam di era digital, serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

Salah satu hal yang menjadi sebuah indikator utama dalam hal menilai kinerja perekonomian pada suatu negara adalah dengan pertumbuhan ekonomi, yang terdefiniskan sebagai sebuah peningkatan terhadap kapasitas produksi perekonomian jangka panjang, yang ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Marcal et al., 2024). Menurut Todaro dan Smith (2009), peningkatan pada output secara kuantitatif bukan menjadi satu-satunya aspek dalam pertumbuhan ekonomi. Yang mana pertumbuhan ekonomi juga mencakup berbagai perubahan struktural yang memberikan peningkatan atas kesejahteraan masyarakat. Teori ini cukup relevan dikarenakan perekonomian negara saat ini sedang berada dalam fase transisi menuju model ekonomi yang berpusat pada inovasi dan nilai tambah.

Dalam model pertumbuhan klasik, seperti teori Harrod-Domar, investasi sangat penting untuk meningkatkan akumulasi modal dan output (Zaharani & Nasir, 2025). Namun, dalam teori pertumbuhan neoklasik Solow, kemajuan teknologi ditambahkan sebagai komponen utama yang menentukan pertumbuhan jangka panjang (Lestari et al., 2025). Teknologi dan inovasi telah menjadi determinan baru untuk produktivitas nasional dalam ekonomi modern, terutama dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Adapun teori transformasi struktural yang dikembangkan oleh W. Arthur Lewis yang mana telah dikaji ulang oleh Chenery (Siagian et al., 2020) menjelaskan bagaimana perekonomian berkembang melalui perubahan struktur produksi, yakni sebuah pergeseran dari sektor pertanian primer ke sektor industri dan jasa sekunder dan tersier. Transformasi ini di Indonesia ditunjukkan oleh industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan industri digital.

Kebijakan fiskal dan moneter, serta pembangunan infrastruktur, diperlukan untuk mendukung perubahan struktur ekonomi yang dinamis ini. Dengan begitu, keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan PDB, tetapi juga pada kemampuan sistem ekonomi untuk menciptakan pekerjaan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya disebabkan oleh transformasi struktural yang menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang kurang produktif menuju sektor modern yang lebih produktif.

Pertumbuhan ekonomi ini bukanlah satu-satunya aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga tentu mencakup transformasi besar dalam pola produksi, struktur sosial, dan distribusi pendapatan. Menurut Sen pada penelitian DHAJO (2024), pada perspektif ini, pembangunan merupakan sebuah proses memperluas kebebasan manusia, termasuk kebebasan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus disertai dengan elemen seperti keadilan, inklusi, dan keberlanjutan.

Tujuan pembangunan nasional sendiri adalah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025. Tujuan ini tentunya sudah sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Ikmal et al., 2024). Selain itu, visi Indonesia Emas 2045 sejalan dengan strategi pembangunan nasional. Visi ini mengutamakan pembangunan manusia dan ekonomi hijau..

Adapun digitalisasi sendiri berarti elemen transformasional yang mengubah distribusi, produksi, dan konsumsi. Ekonomi digital memasuki "era mesin kedua", di mana AI dan TI menggantikan banyak peran manusia dalam proses ekonomi (Damanik et al., 2025). Meskipun ekonomi digital membuka peluang baru dalam industri seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif, ia juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan digital dan monopoli platform.

Dalam teori Schumpeter (1983), Inovasi berubah menjadi kekuatan pendorong utama pertumbuhan melalui proses kreatif dekonstruksi, di mana teknologi baru digunakan untuk menggantikan sistem yang lebih tua dan tidak efisien. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana ekonomi Indonesia berubah dengan cepat, dengan digitalisasi menjadi lebih efisien tetapi juga membutuhkan peraturan moral untuk

mencegah diskriminasi sosial ekonomi. Oleh karena itu, digitalisasi harus diikuti oleh kebijakan yang memastikan penggunaan data yang adil dan etis..

Kemudian teori kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga ekonomi makro stabil. Dalam bukunya "The General Theory Of Employment", Keynes memiliki pendapat bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti belanja publik dan perpajakan, dapat mempertahankan siklus ekonomi (Aprilianty et al., 2023). Namun, kebijakan moneter berfungsi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan menjaga nilai tukar dan inflasi. Melalui instrumen suku bunga dan pengendalian likuiditas, bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter yang responsif dan terkoordinasi dengan kebijakan fiskal sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global saat ini.

Dalam teori politik campuran, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga keseimbangan makroekonomi (Adzam et al., 2025). Kemampuan Indonesia untuk mempertahankan inflasi di kisaran target dan mempertahankan kepercayaan pasar tergantung pada keberhasilan kebijakan ini pada tahun 2025. Untuk mengarahkan pembangunan ekonomi agar berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, ekonomi Islam memberikan kerangka normatif dan praktis. Tidak diragukan lagi, ekonomi Islam menentang perspektif pertumbuhan yang mengeksploitasi dan memprioritaskan prinsip masalah, atau kemaslahatan umum, sebagai tujuan utama. Keadilan distributif, larangan riba, penghindaran gharar (ketidakpastian), dan pengelolaan sumber daya yang beretika adalah prinsip-prinsip utama.

Ekonomi Islam sendiri memiliki dua fungsi dalam digitalisasi ekonomi. Pertama, itu berfungsi sebagai koreksi normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi agar etis; kedua, itu berfungsi sebagai alat praktis melalui mekanisme zakat, wakaf, dan fintech syariah (Arif, 2022). Terbukti bahwa kombinasi nilai-nilai syariah dengan teknologi digital meningkatkan inklusi keuangan, redistribusi kesejahteraan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan moral dan solusi praktis untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi dan transformasi digital. Teori ini juga menegaskan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek moral dan spiritual, yang merupakan fondasi keberlanjutan sosial.

Demikian teori-teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis struktur dan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2025 harus dilakukan menggunakan kerangka berbagai dimensi yang menggabungkan teori pertumbuhan, transformasi

struktural, ekonomi digital, kebijakan makro, dan ekonomi Islam. Menggabungkan beberapa teori ini akan memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang jalan pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

B. Hasil Penelitian

1. Struktur Perekonomian Indonesia Tahun 2025

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan lanjutan proses transformasi struktural yang telah berlangsung beberapa dekade, di mana kontribusi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) menyusut relatif terhadap sektor industri dan jasa sehingga perekonomian semakin didominasi oleh aktivitas berbasis nilai tambah dan layanan; data sektoral terbaru menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian dalam PDB berada pada level yang jauh lebih rendah dibandingkan porsi sektor jasa yang menempati posisi teratas, sementara industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung transformasi nilai tambah industri. Pergeseran ini konsisten dengan pola teori transformasi struktural yang mengindikasikan peralihan tenaga kerja dan output dari pertanian menuju industri serta jasa seiring peningkatan produktivitas dan urbanisasi. Di lapangan, ekspansi sektor jasa terutama perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan digital telah meningkatkan kontribusi subsektor tersier terhadap agregat ekonomi, sedangkan manufaktur menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan peningkatan nilai tambah akibat kebijakan hilirisasi dan investasi pada rantai pasok domestik (Yahawi et al., 2025).

Meskipun demikian, transformasi struktural ini tidak berlangsung merata secara spasial: Pulau Jawa masih menyumbang porsi besar PDB nasional sehingga ketimpangan antarwilayah tetap menjadi masalah penting yang menuntut kebijakan desentralisasi investasi, pengembangan kawasan industri di luar Jawa, dan peningkatan konektivitas infrastruktur. Dari sisi tenaga kerja, pergeseran sektor juga terlihat melalui penurunan proporsi pekerja di pertanian dan kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa dan manufaktur berteknologi menengah, namun tantangan peningkatan produktivitas per pekerja masih nyata termasuk kebutuhan investasi besar dalam pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi untuk menutup kesenjangan keterampilan. Singkatnya, struktur perekonomian Indonesia 2025 menunjukkan dominasi jasa, peran signifikan industri manufaktur yang sedang bertransformasi menuju hilirisasi, serta penurunan relatif sektor pertanian dalam kontribusi terhadap PDB; kondisi ini membuka peluang percepatan pertumbuhan nilai tambah tetapi juga menegaskan kebutuhan kebijakan yang menanggulangi ketimpangan antarwilayah

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar manfaat transformasi dapat tersebar lebih merata (Simanjuntak & Widodo, 2025).

Peran investasi, konsumsi, dan ekspor dalam pembentukan struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sangat dominan dalam menentukan arah pertumbuhan dan daya saing nasional. Dari sisi permintaan agregat, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi, menyumbang sekitar 54-56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan kuatnya daya beli dan stabilitas konsumsi masyarakat di tengah dinamika global. Namun, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan peningkatan signifikan sebagai cerminan pergeseran ke arah perekonomian yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Investasi publik dalam infrastruktur dan industri strategis seperti energi, transportasi, serta sektor manufaktur menengah menjadi katalis transformasi ekonomi di berbagai wilayah. Selain itu, penanaman modal asing (PMA) dalam sektor hilirisasi nikel, petrokimia, dan energi terbarukan berperan penting dalam memperdalam struktur industri nasional dan memperkuat basis ekspor (Simanjuntak & Widodo, 2025).

Kinerja ekspor turut memainkan peran vital dalam memperkuat struktur ekonomi. Peningkatan nilai ekspor produk nonmigas, terutama dari sektor manufaktur dan produk berbasis sumber daya alam yang telah diolah, menunjukkan kemajuan proses hilirisasi. Ekspor komoditas bernilai tambah seperti baja nirkarat, baterai listrik, dan produk olahan kelapa sawit memperluas diversifikasi struktur ekspor Indonesia yang sebelumnya terlalu bergantung pada bahan mentah. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal masih relatif tinggi, yang menandakan perlunya penguatan industri antara dan pengembangan rantai pasok domestik. Secara keseluruhan, keseimbangan antara konsumsi domestik, investasi produktif, dan ekspor berorientasi nilai tambah menjadi fondasi utama pembentukan struktur ekonomi Indonesia yang tangguh dan inklusif pada tahun 2025 (Dafana et al., 2024).

Di sisi lain, ketimpangan struktural antarwilayah masih menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari 56% PDB nasional, sedangkan kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua menyumbang kurang dari 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi belum sepenuhnya merata, baik dari sisi infrastruktur, industri, maupun akses tenaga kerja produktif. Faktor utama penyebab ketimpangan tersebut antara lain perbedaan tingkat industrialisasi, ketersediaan sarana logistik, serta akses terhadap investasi dan pendidikan. Pemerintah berupaya mengatasi disparitas ini

melalui strategi pemerataan pembangunan berbasis wilayah, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan infrastruktur transportasi dan energi di luar Jawa, serta pemberian insentif fiskal bagi investasi di daerah tertinggal. Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas ekonomi lokal serta mengurangi ketimpangan regional. Keberhasilan strategi pemerataan ekonomi ini akan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas tata kelola anggaran, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi unggulannya untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan (Wartono et al., 2024).

2. Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2025

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan laporan resmi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,2–5,4% secara tahunan, mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi yang kuat di tengah gejolak eksternal dan perubahan harga komoditas global. Stabilitas makroekonomi ini didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur serta kebijakan moneter yang berhati-hati dalam menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran $3,0 \pm 1\%$. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif stabil pada level rata-rata Rp15.400 per USD, sementara suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dipertahankan di kisaran 6,0% untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga (Ahmad et al., 2020).

Selain itu, posisi cadangan devisa nasional yang mencapai lebih dari USD 140 miliar pada pertengahan tahun 2025 menegaskan ketahanan sektor eksternal Indonesia terhadap tekanan global, termasuk fluktuasi harga minyak dan potensi perlambatan ekonomi dunia. Kinerja sektor keuangan nasional juga menunjukkan perbaikan, dengan rasio kredit terhadap PDB meningkat dan penyaluran kredit produktif yang tumbuh di atas 9% secara tahunan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan stabilitas sektor keuangan (Kushendratno & Suharto, 2024).

Dari sisi sektor riil, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2025 didorong oleh pemulihan kuat pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Industri manufaktur berkontribusi sekitar 19% terhadap PDB, mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang meningkatkan nilai tambah ekspor produk berbasis nikel, baja, dan kimia dasar. Sektor jasa, terutama

perdagangan, transportasi, dan informasi-komunikasi, terus tumbuh pesat didorong oleh digitalisasi ekonomi dan ekspansi teknologi finansial. Di sisi lain, sektor pertanian masih menghadapi tekanan akibat perubahan iklim dan keterbatasan produktivitas, meskipun tetap menjadi penopang utama bagi daerah pedesaan (Manurung, 2025).

Produktivitas nasional menjadi isu utama dalam memperkuat kinerja ekonomi. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, dengan nilai produktivitas per pekerja sekitar USD 28.000 per tahun, jauh di bawah rata-rata kawasan. Rendahnya adopsi teknologi, kualitas pendidikan vokasi, dan kesenjangan keterampilan menjadi faktor yang membatasi peningkatan produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan reformasi sumber daya manusia dan investasi dalam riset, inovasi, serta pendidikan vokasi sebagai agenda prioritas pembangunan ekonomi 2025-2029 (Djirimu, 2020).

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2025 mencerminkan kombinasi antara stabilitas makroekonomi yang terjaga dan transformasi sektor riil yang semakin inklusif. Tantangan utama yang masih dihadapi terletak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemerataan pertumbuhan antarwilayah, serta diversifikasi basis industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan fokus pada penguatan struktur ekonomi domestik, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat global (Mas et al., 2025).

Perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia tahun 2025 menunjukkan arah pemulihan yang cukup positif seiring dengan stabilnya situasi ekonomi global dan meningkatnya permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan nasional. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor Indonesia pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan harga komoditas mineral dan produk manufaktur bernilai tambah. Sektor ekspor nonmigas, khususnya produk hilirisasi nikel, sawit, dan kendaraan listrik, menjadi pendorong utama kinerja perdagangan luar negeri. Meskipun demikian, impor bahan baku dan barang modal juga meningkat seiring ekspansi industri, sehingga neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus moderat. Menurut laporan Bank Indonesia, posisi neraca pembayaran Indonesia tetap kuat dengan defisit transaksi berjalan yang terkendali di bawah 1% terhadap PDB, sementara surplus transaksi modal dan finansial meningkat karena arus masuk investasi asing langsung (FDI) yang stabil (INDONESIA, n.d.).

Namun, ketergantungan terhadap komoditas primer masih menjadi tantangan struktural yang dapat memengaruhi ketahanan eksternal. Untuk memperkuat neraca pembayaran, pemerintah terus mendorong diversifikasi ekspor serta memperluas pasar nontradisional di Asia Selatan dan Afrika (Suryahani et al., 2024). Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi harga global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2025 mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 4,8%, menunjukkan keberhasilan program penciptaan lapangan kerja melalui investasi padat karya dan ekonomi digital (Guna & Arifin, 2025). Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga didukung oleh adopsi teknologi dan program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun, tantangan tetap ada dalam hal kesenjangan kualitas tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai provinsi. Program perlindungan sosial dan subsidi energi yang lebih tepat sasaran turut menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Secara keseluruhan, kombinasi stabilitas perdagangan luar negeri, penguatan neraca pembayaran, serta peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 (Aziz & Husenudin, 2024).

3. Pembangunan Nasional dan Pemerataan Ekonomi

Kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menekankan arah pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan fokus utama pada peningkatan produktivitas nasional serta pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menetapkan sasaran strategis berupa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, dan peningkatan daya saing industri berbasis inovasi. Dalam konteks makro, RPJMN 2025-2029 dirancang untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, digitalisasi sektor produktif, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru. Kebijakan ini juga diiringi dengan upaya memperbaiki iklim investasi dan reformasi birokrasi guna mendorong efisiensi ekonomi nasional (Rezkita et al., 2025).

Salah satu pilar utama dalam RPJMN 2025-2029 adalah upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan luar Jawa melalui optimalisasi peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Program *Indonesia Sentris* dilanjutkan dengan penekanan pada integrasi pembangunan desa-kota dan pengurangan kesenjangan antar wilayah timur dan barat Indonesia. Pendekatan pembangunan wilayah diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi regional melalui penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, serta industri kecil dan menengah (Estede et al., 2025).

Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus kebijakan nasional, di mana strategi pengentasan dilakukan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program perlindungan sosial adaptif, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Selain itu, penerapan *one data policy* digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan di tingkat rumah tangga. Melalui sinergi antarinstansi dan partisipasi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan nasional diharapkan tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan memperkuat keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat (Kamsariaty & SM, 2025).

Peningkatan daya saing dan inovasi sektor industri menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional tahun 2025. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, arah kebijakan industri diarahkan pada penguatan struktur industri berbasis teknologi dan inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Pemerintah menargetkan terciptanya industri bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, seperti industri otomotif listrik, kimia hijau, farmasi, serta komponen elektronik. Strategi penguatan daya saing juga diwujudkan melalui kebijakan insentif fiskal, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, serta kolaborasi riset antara lembaga pendidikan dan sektor swasta. Selain itu, implementasi *National Industrial Strategy 4.0* berperan penting dalam mendorong otomatisasi, digitalisasi, dan efisiensi rantai pasok (Muhibudin et al., n.d.).

Inovasi menjadi elemen penting dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional, tingkat intensitas riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di bidang teknologi manufaktur, energi terbarukan, dan bioteknologi. Pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem inovasi melalui kemitraan triple helix antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Dengan adanya

integrasi antara kebijakan industri dan riset terapan, diharapkan muncul produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah domestik (Lase et al., 2024).

Selain industri konvensional, penguatan ekonomi digital dan hilirisasi menjadi penggerak utama pertumbuhan baru. Ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS, didorong oleh meningkatnya aktivitas e-commerce, *fintech*, dan *digital services*. Pemerintah berfokus pada pengembangan infrastruktur digital nasional, perluasan jaringan 5G, serta peningkatan literasi digital untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit, juga diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan devisa dan lapangan kerja (Harahap, 2024).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah memperkuat dukungan melalui pembiayaan inklusif, digitalisasi bisnis, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar. Program *Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia* (BBI) menjadi katalis untuk meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar digital, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah. Melalui kombinasi inovasi industri, ekonomi digital, hilirisasi, dan penguatan UMKM, Indonesia diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Prospek ke Depan

Tantangan struktural dan eksternal yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2025 masih cukup kompleks, meskipun tren pertumbuhan menunjukkan arah positif. Dari sisi struktural, ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan rendahnya tingkat diversifikasi industri menjadi kendala utama dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketimpangan produktivitas antarwilayah serta kesenjangan antara sektor formal dan informal juga berpotensi memperlambat proses transformasi ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik di luar Pulau Jawa dan akses permodalan bagi pelaku UMKM masih menjadi hambatan yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan (Yahawi et al., 2025).

Dari sisi eksternal, ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan moneter di negara maju turut memengaruhi stabilitas nilai tukar dan arus modal ke Indonesia. Fluktuasi harga komoditas dunia, terutama energi dan pangan, berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi domestik. Selain itu, meningkatnya kompetisi regional di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi

asing langsung (FDI) menuntut Indonesia untuk terus memperbaiki iklim usaha dan memperkuat regulasi yang mendukung efisiensi ekonomi. Tantangan digitalisasi juga tidak kalah penting, terutama dalam hal kesiapan tenaga kerja dan perlindungan data di tengah percepatan transformasi ekonomi berbasis teknologi (Afandi et al., 2024).

Isu keberlanjutan menjadi aspek penting dalam prospek pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Transisi energi menuju sumber energi bersih dan terbarukan menjadi keharusan dalam mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060. Pemerintah terus memperluas investasi di bidang energi surya, angin, dan bioenergi, serta mendorong dekarbonisasi industri berat melalui penerapan teknologi rendah karbon. Namun, tantangan muncul dalam hal pembiayaan hijau dan kesiapan teknologi yang masih terbatas di sektor-sektor tertentu. Selain transisi energi, perubahan iklim menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata (Rismanto, 2024).

Kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut menuntut penerapan strategi adaptasi berbasis ketahanan iklim. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi hijau menjadi salah satu pilar penting yang diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Prospek ke depan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia, asalkan mampu mengatasi tantangan struktural dan mempercepat agenda keberlanjutan. Sinergi antara kebijakan makroekonomi, inovasi industri, dan pembangunan hijau akan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif, resilien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Aulia et al., 2025).

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah menunjukkan arah yang optimistis dengan proyeksi pertumbuhan PDB berada di kisaran 5,4–5,8% per tahun selama periode 2025-2029. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan investasi produktif, pemulihan konsumsi rumah tangga, serta perluasan ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi. Sektor industri pengolahan, jasa digital, dan energi terbarukan menjadi motor utama pendorong ekspansi ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia (2025), stabilitas makroekonomi juga akan tetap terjaga melalui pengelolaan kebijakan moneter yang hati-hati, nilai tukar yang stabil, serta penguatan koordinasi fiskal dan moneter. Selain itu, kebijakan hilirisasi dan diversifikasi sumber pertumbuhan baru di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi finansial diharapkan mampu memperluas basis ekonomi nasional dan menciptakan ketahanan terhadap guncangan eksternal (Oktaviani et al., 2025).

Arah kebijakan ekonomi jangka menengah menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu transformasi struktural, keberlanjutan fiskal, dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen memperkuat transformasi ekonomi melalui reformasi industri, digitalisasi sektor publik dan swasta, serta peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi masa depan. Reformasi fiskal dilakukan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan memperkuat transfer fiskal ke daerah guna memperkecil kesenjangan pembangunan. Selain itu, penguatan sistem jaminan sosial, perluasan lapangan kerja hijau, dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi landasan kebijakan ekonomi inklusif yang mendukung pertumbuhan berkeadilan (Wartono et al., 2024).

Implikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional cukup signifikan, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan ketimpangan. Dengan arah kebijakan ekonomi yang konsisten, Indonesia berpotensi mencapai sebagian besar target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, khususnya dalam bidang kemiskinan, pendidikan, energi bersih, dan pekerjaan layak. Implementasi ekonomi hijau dan transisi energi juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan lingkungan serta mendorong terciptanya model pembangunan yang lebih berkelanjutan (Dafana et al., 2024).

Lebih jauh, keberhasilan kebijakan ekonomi jangka menengah akan menentukan kemampuan Indonesia keluar dari *middle income trap* dan bertransformasi menuju negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk itu, koordinasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan sangat diperlukan agar reformasi struktural berjalan efektif. Dengan memperkuat fondasi ekonomi berbasis inovasi, inklusi sosial, dan keberlanjutan, Indonesia diharapkan mampu mencapai visi pembangunan nasional yaitu “Indonesia Emas 2045” yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

KESIMPULAN

Struktur dan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2025 mencerminkan arah transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Transformasi struktural yang terjadi menunjukkan pergeseran kontribusi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan jasa, dengan dukungan kuat dari digitalisasi, hilirisasi, serta peningkatan peran investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi. Peningkatan produktivitas nasional dan stabilitas makroekonomi menjadi bukti bahwa pondasi ekonomi Indonesia semakin kuat menghadapi tantangan global (Bappenas, 2025; Bank Indonesia, 2025).

Di sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran tetap menunjukkan tren positif, sekalipun masih dihadapkan pada fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekspor, pengendalian inflasi, serta penciptaan lapangan kerja telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Perdagangan, 2025; BPS, 2025).

Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan penguatan daya saing industri berbasis inovasi. Pengembangan ekonomi digital dan pemberdayaan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, sedangkan transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan jangka panjang (Kemenko Perekonomian, 2025; Kemenperin, 2025).

Meskipun demikian, tantangan struktural seperti ketimpangan produktivitas antarwilayah, ketergantungan pada komoditas primer, serta kesiapan SDM menghadapi digitalisasi masih perlu diatasi secara konsisten. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap menjanjikan, dengan arah kebijakan yang menekankan transformasi industri, reformasi fiskal, serta pembangunan berkeadilan. Jika kebijakan ini dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle income trap dan mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” yang makmur, mandiri, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (World Bank, 2025; UNDP Indonesia, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, M., Lubis, M. M., Rahmayani, M. W., Kusumastuti, S. Y., Kusumawardhani, F., Juniartika, S., & Fathah, R. N. (2025). *Dinamika Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Afandi, C. I., Bahri, S., & Hatib, M. (2024). Tren Terbaru Dalam Ekonomi Keuangan: Menjelajahi Dinamika Pasar Global Dan Lokal Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 15–39.
- Ahmad, T., Nugroho, A. S., Abdullah, R., & Sumarto, A. H. (2020). *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi*. Indef.
- Aprilianty, K., Kemi, K. H. M., Oktaviani, R., Permatasari, R., & Mulyani, S. (2023). *Evolution of Economics Macro*. X (X).
- Arif, M. (2022). *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group.

- Aulia, M. R., Hartini, H., Qudraty, M., Muzammil, A., & Tanjung, Y. W. (2025). *Ekonomi Hijau: Harmonisasi Keadilan Sosial dan Lingkungan di Provinsi Aceh*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450–1466.
- Dafana, E. P. R., Dinarti, R. P., & Yasin, M. (2024). Menganalisis Potret Industri Indonesia Berdasarkan Industri Pengolahan Migas dan Non-Migas. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 121–127.
- Damanik, F. H. S., Sirait, H., Minarsi, A., Abae, I., Hendratni, T. W., & Purba, J. H. V. (2025). *Transformasi Ekonomi: Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Global di Abad ke-21*. Star Digital Publishing.
- DHAJO, E. (2024). *Pembangunan sebagai Kebebasan: Telaah atas Pandangan Soedjatmoko mengenai Pembangunan*. IFTK LEDALERO.
- Djirimu, M. A. (2020). Peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia di ASEAN sebagai upaya peningkatan daya saing. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(3), 195–215.
- Estede, S., Rustiyana, R., Lestari, E. K., Abae, I., Kusumastuti, S. Y., Muta'ali, L., Anitasari, M., Dwipatna, I. M. J. A., Juansa, A., & Zulkarnaen, A. (2025). *Ekonomi Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi dan Inovasi*. Star Digital Publishing.
- Guna, G. A., & Arifin, S. (2025). *Dampak Sosial Dari Penerapan Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (Siduta) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. IPDN.
- Harahap, S. (2024). Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(2), 217–238.
- INDONESIA, P. P. I. S. E. (n.d.). *Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif Di Era New Normal*.
- Kamsariaty, S. E., & SM, M. M. (2025). Tentang Penulis. *Manajemen Transportasi*, 156.
- Kushendratno, D., & Suharto, E. (2024). Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank terhadap Kinerja Penyaluran Kredit pada Bank Umum Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 8683–8708.
- Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 114–129.

- Lestari, F. P., Astuti, R. P., Putri, A. M., & Rohman, M. A. A. (2025). Analisis Perkembangan Produk Investasi Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 3(1), 32–48.
- Manurung, I. A. (2025). *Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Di Indonesia Tahun 2018–2024*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marcas, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47.
- Mas, I. G. A. M. A., Pratiwi, A., Kusumastuti, S. Y., Judijanto, L., Chaniago, N., Baroroh, H., Adriana, M., & Kunawangsih, T. (2025). *Ekonomi Keuangan dan Perbankan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhibudin, F. W., Palupiningrum, A. W., Anggraini, R. I., Watazawwadu'Ilmi, S., & Holis, A. (n.d.). *Proyeksi Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia*.
- Oktaviani, D., Putri, A. S., Goeltom, L. A. N., & Nurfaidah, S. (2025). Peran Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Pertumbuhan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(11), 97–103.
- Rezkita, M. R., Pilda, L. M. S., Zafira, M. R. N., Christiana, M., JW, K. C. I., & Ulhaq, M. Z. (2025). Strategi Pertumbuhan Tidak Berimbang dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Lombok Utara 2025-2029. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1033–1046.
- Rismanto, R. (2024). Peran Investasi Pada Energi Terbarukan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Era Net-Zero Emissions. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 3(1), 343–361.
- Schumpeter, J. A. (1983). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle* (Vol. 55). Transaction publishers.
- Siagian, V., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Purba, P. B., Nainggolan, L. E., Nugraha, N. A., Siregar, R. T., Lifchatullaillah, E., Marit, E. L., & Simarmata, H. M. P. (2020). *Ekonomi dan bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Simanjuntak, S. H., & Widodo, W. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 28–41.
- Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.

- Wartono, T., Maichal, M., & Apriyanto, A. (2024). *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yahawi, S. H., Esha, D., Hartinah, S., Siregar, Y. S., Saputro, A. E., Abas, S., Mohsin, M., Febrina, I., Firmansyah, M., & Sudarmanto, E. (2025). *Sistem Perekonomian Indonesia*. Minhaj Pustaka.
- Zaharani, A. Z., & Nasir, M. (2025). Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(01), 1–14.